



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
**UNIT KERJA** : PIMPINAN TERTINGGI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **DIAN KRISTIANDI**
2. Jabatan : **BUPATI**
3. NHK : **48997**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 10.049.222.075**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 317 m<sup>2</sup>/650 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 3.200.000.000
2. Tanah Seluas 2270 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 997.500.000
3. Tanah Seluas 2361 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 840.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 865 m<sup>2</sup>/865 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000
5. Tanah Seluas 2336 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 594.000.000
6. Tanah Seluas 2832 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 120.750.000
7. Tanah Seluas 294 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 47.250.000
8. Tanah Seluas 1317 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 194.472.075
9. Tanah Seluas 263 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 84.000.000
10. Tanah Seluas 646 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 52.500.000
11. Tanah Seluas 594 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 42.000.000
12. Tanah Seluas 759 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI



Rp. 52.500.000

13. Tanah Seluas 660 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI

Rp. 325.500.000

14. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/350 m2 di KAB / KOTA

JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 787.500.000

15. Tanah dan Bangunan Seluas 7210 m2/7210 m2 di KAB / KOTA

JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 866.250.000

16. Tanah Seluas 4769 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI

Rp. 160.000.000

17. Tanah Seluas 1322 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI

Rp. 55.000.000

18. Tanah Seluas 2151 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI

Rp. 55.000.000

19. Tanah Seluas 2747 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI

Rp. 55.000.000

20. Tanah Seluas 4180 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI

Rp. 210.000.000

21. Tanah Seluas 583 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI

Rp. 620.000.000

22. Tanah Seluas 8170 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI

Rp. 295.000.000

23. Tanah Seluas 2200 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI

Rp. 80.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp.

**1.084.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER JEEP Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

3. MOBIL, HINO TRUCK TRONTON Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000

4. MOBIL, MITSUBISHI HINO TRUCK TRONTON Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

5. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2,4 L DAKKAR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp.

**550.000.000****D. SURAT BERHARGA**

Rp.

----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	140.485.839
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	11.823.707.914
III. HUTANG	Rp.	250.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	11.573.707.914

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.